

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada rezim opresif pasca pengambilalihan pemerintahan Afghanistan oleh Taliban, *queer* muslim menjadi kelompok yang mengalami kekerasan sistematis, khususnya dalam bentuk *wartime sexual violence* yang bersifat fisik, simbolik, dan eksistensial. Kekerasan ini tidak terjadi dalam ruang hampa atau hanya sebagai gagasan abstrak karena merupakan bagian dari proyek ideologis yang berupaya untuk menegakkan hegemoni heteronormatif falogosentris dalam tatanan sosial-politik berbasis tafsir keagamaan dan nilai-nilai budaya patriarkat. Melalui analisis interpretatif, penelitian ini menganalisis bagaimana wacana Taliban membingkai *queer* muslim sebagai ancaman terhadap stabilitas moral, kehormatan, dan keislaman, bahkan ketika individu *queer* tidak menunjukkan performativitas gender secara publik. Dari analisis tersebut, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan utama yang disusun sebagai berikut:

1. **Falogosentrisme Taliban dibentuk melalui simbiosis antara adat *Pashtunwali* dan tafsir keagamaan konservatif**, yang bersama-sama menyusun sistem nilai maskulinitas hegemonik dan menyucikan struktur patriarkat. Wacana keagamaan tidak berdiri sendiri karena berkelindan dengan adat sebagai alat legitimasi kekuasaan gender berbasis moralitas Islam.
2. **Eksistensi *queer* muslim diposisikan sebagai ancaman terhadap tatanan ontologis dan moral**, bahkan ketika tidak menampilkan ekspresi gender secara publik. Taliban tidak hanya menolak ekspresi seksual atau identitas gender nonheteronormatif, tetapi juga eksistensi itu sendiri, yang menunjukkan adanya jukstaposisi paradoksal, yakni *queer* muslim dianggap mengancam sekalipun secara visibilitas mereka tidak tampak.
3. **Taliban menggunakan kekerasan simbolik dan fisik sebagai bentuk institusionalisasi heteronormativitas**. Tubuh *queer* dijadikan sebagai

objek opresi melalui penyiksaan, penghilangan, hingga pembunuhan yang dibingkai sebagai penegakan hukum agama. Interpretasi naratif menunjukkan bahwa praktik ini dimungkinkan oleh strategi wacana seperti *presupposition*, *semantic polarization*, dan *ideological squaring* yang membagi dunia menjadi bermoral vs. menyimpang.

4. **Hegemoni Taliban berbenturan dengan norma-norma internasional tentang diversitas gender.** Seruan internasional untuk akuntabilitas terhadap kejahatan berbasis gender menunjukkan bahwa wacana Taliban tidak dapat lepas dari tekanan geopolitik. Dinamika ini mencerminkan bentuk jukstaposisi Taliban di antara norma gender global.
5. **Meskipun mengalami opresi, *queer muslim* di Afghanistan membentuk *counter-discourse* melalui strategi keberlangsungan hidup.** Migrasi, solidaritas transnasional, dan narasi digital menunjukkan bahwa *queer muslim* mempunyai ruang legitimasi baru untuk keberlangsungan hidup di mata internasional.

4.2 Saran

Diskursus mengenai kekerasan seksual di masa perang terhadap kelompok gender marginal memiliki kompleksitas yang tidak dapat disederhanakan hanya melalui sudut pandang statistik atau kelembagaan. Sebab, kompleksitas yang dimaksud terletak pada bagaimana bahasa, budaya, dan kekuasaan bekerja secara simultan dalam membentuk siapa yang dianggap sebagai korban yang ‘layak diperhatikan’ dan siapa yang disingkirkan dari narasi utama. Maka dari itu, penting bagi penelitian di bidang hubungan internasional untuk membuka ruang bagi pendekatan interseksional yang mengaitkan gender, budaya, dan dinamika kekuasaan dalam konteks konflik. Hal ini akan memperluas pemahaman tentang kekerasan seksual dalam perang sekaligus memberikan kontribusi pembangunan teori yang lebih inklusif dan dekolonial dalam memahami keamanan dan kerentanan manusia.